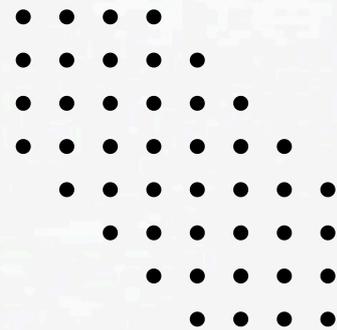


# Executive Summary

**Jasa Konsultasi Penelitian Kemiskina Ekstrem  
di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2024**



## Executive Summary

### Jasa Konsultasi Penelitian Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

#### A. Pendahuluan

Selama ini, data penduduk miskin di Kabupaten Belu berasal dari dua sumber yakni BPS dan P3KE. Merujuk pada data yang dikeluarkan BPS, tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu pada tahun 2022 sebesar 14,84% atau 33.980 jiwa. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Belu pada tahun 2021 mencapai 69.506 jiwa atau 13.134 KK. Perbedaan parameter antara BPS dan P3KE menyebabkan banyak perbedaan data eksisting penduduk miskin di berbagai wilayah. Namun, kedua lembaga tersebut masih menggunakan parameter kemiskinan yang teknokratik baik dari kemampuan belanja maupun pendapatan secara umum. Hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut tentang parameter dan realita sosio, ekonomi, politik, kultural yang lebih holistik untuk menggambarkan isu kemiskinan ekstrem.

Sebelumnya, telah ada penelitian terkait kemiskinan di NTT yang dilakukan oleh LAURA UGM dan The Smeru Research Institute. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Antropologi Untuk Riset dan Aksi (LAURA) UGM (2018), tingginya angka kemiskinan di Sumba Barat, NTT berkaitan dengan isu dinamika sosial-budaya setempat. Kelindan moralitas ekonomi pertukaran dengan ekonomi pasar yang sifatnya transaksional, menghasilkan ketimpangan atau friksi sosial dan memunculkan kekerabatan semu, eskalasi serta perubahan nilai/ valorisasi upacara adat. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan (resiprositas negatif) yang menyebabkan “pemborosan-adat” dan gejala sosial lainnya, seperti; tingginya kriminalitas hewan ternak (terutama kerbau), jual-beli lahan, dan lilitan hutang lintas generasi. Kaum marginal, yaitu perempuan dan anak menjadi pihak yang paling tereksplorasi dari adanya resiprositas negatif ini.

Berdasarkan hasil penelitian *The Smeru Research Institute* (2022), pada periode 1996–2006 terjadi peningkatan kesejahteraan di setiap desa/ komunitas di Timor Barat. Namun, ambivalensi eskalasi kesejahteraan tersebut tidak selalu diikuti dengan keberhasilan komunitas dan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Belenggu kemiskinan terjadi karena berbagai faktor, yaitu: (1) gagal panen akibat cuaca ekstrem musim kering berkepanjangan, (2) kriminalitas aset terutama hewan ternak, (3) sistem adat yang mengikat, (4) berkurangnya produktifitas karena usia senja, dan 5) peralihan pekerjaan dari sektor jasa ke pertanian (Fillaili dan Marianti, 2022: 112–113). Berdasarkan hasil studi tersebut, jalan keluar dari belenggu kemiskinan perlu ditunjang dengan berbagai faktor, yaitu: (1) tingkat

kapasitas sumber daya manusia yang memadai, (2) struktur peluang yang tersedia, seperti ketersediaan kesempatan kerja dan informasi yang inklusif, serta (3) kapasitas organisasi lokal (*idem*: ii).

Oleh karena itu, perlu adanya kajian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu untuk mendalami persoalan kemiskinan ekstrem yang kompleks menjadi lebih terukur dan terorganisir dalam menetapkan konsep, permasalahan utama, peluang relevansi program dan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu ini dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni 2025–2030. Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang terdiri dari observasi lapangan, pengumpulan data sekunder, wawancara mendalam, dan diskusi terpumpun (FGD).

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penelitian kemiskinan ekstrem, yaitu:

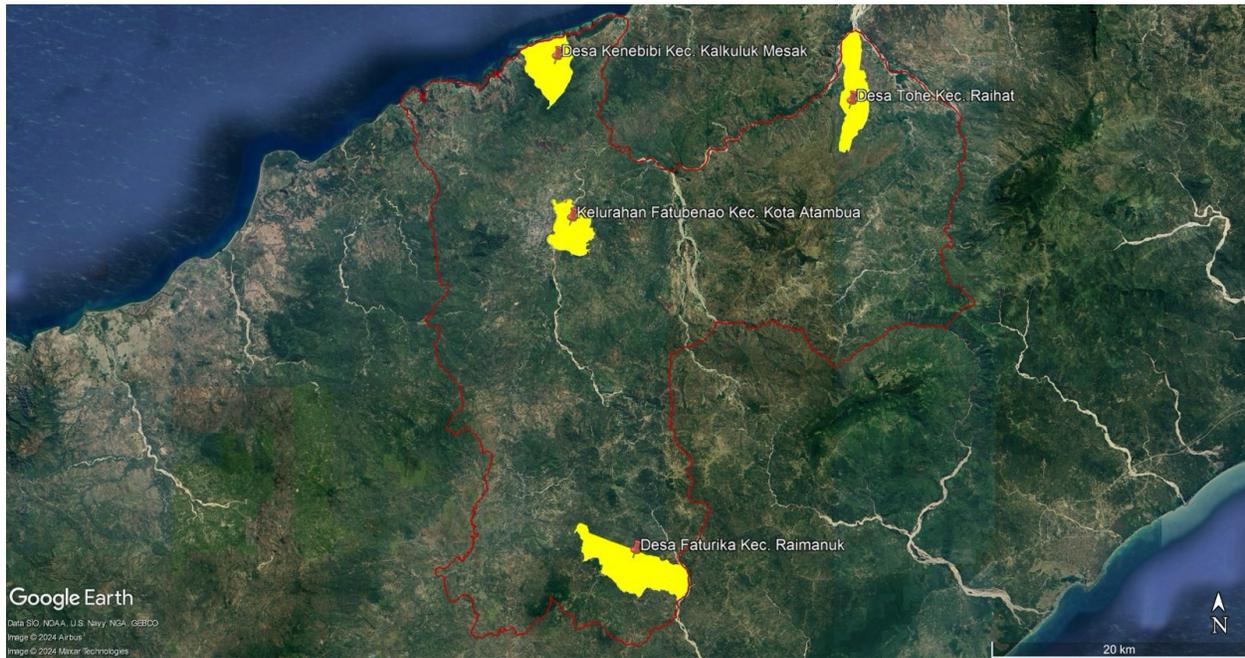
- a. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan ekstrem saat ini;
- b. Menghasilkan usulan arah dan tujuan penanggulangan ekstrem jangka pendek dan jangka menengah (lima tahun ke depan);
- c. Memetakan peran serta berbagai stakeholder dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu;
- d. Menghasilkan parameter monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## **C. Lokasi**

Ruang lingkup kegiatan penelitian Kemiskinan Ekstrem dilakukan di 4 (empat) kecamatan, masing-masing kecamatan dilakukan penelitian pada 1 (satu) kelurahan dan 3 (tiga) desa. Berikut rincian lokasi penelitian berdasarkan karakteristik wilayah:

- a. Wilayah pesisir di Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak
- b. Wilayah dataran hijau di Desa Tohe Kecamatan Raihat
- c. Wilayah kering di Desa Faturika Kecamatan Raimanuk
- d. Wilayah Kota di Kelurahan Fatubeno Kecamatan Kota Atambua

**Gambar 1.1 Peta Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur**



**Sumber:** Tim Penelitian Kemiskinan Ekstrem Belu, NTT Universitas Gadjah Mada

#### **D. Temuan**

**Penyebab Kemiskinan Ektstrem:** Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pendidikan dan kesehatan, prevalensi stunting yang tinggi. Selain faktor di atas, masih ada faktor lain yang relevan yakni faktor ekonomi, terkait terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi, kualitas pertanian dan peternakan, seperti pekerjaan yang layak dan produktif, serta infrastruktur yang tidak memadai, terutama di wilayah pedesaan. Tingkat pengangguran dan pekerjaan tidak tetap yang tinggi juga turut memperparah kemiskinan, membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi.

**Kebijakan yang Ada Saat Ini dan Transformasinya:** Kebijakan yang saat ini berlaku perlu ditingkatkan dari pendekatan *top-down* yang terfokus pada distribusi bantuan, menuju program yang lebih spesifik dan *human-centered development*. Program "*Quick Win*" diperlukan untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan (misalnya, memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS agar lebih akurat). Sementara itu, program jangka pendek dan menengah harus fokus pada pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial yang lebih

merata. Transformasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

**Pentingnya *Roadmap* Jangka Pendek dan Menengah:** *Roadmap* penanggulangan kemiskinan yang terencana sangat diperlukan agar intervensi dapat terarah dan tepat sasaran. *Roadmap* ini harus mencakup program-program yang bersifat jangka pendek (seperti pendataan ulang dan distribusi bantuan yang lebih transparan), serta program jangka menengah yang mencakup peningkatan kapasitas SDM dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini akan memungkinkan pencapaian yang terukur dan memastikan bahwa upaya-upaya pemerintah dapat terus disesuaikan dengan situasi di lapangan.

**Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam Implementasi Kebijakan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus menunjukkan komitmen yang kuat melalui regulasi seperti Peraturan Bupati (Perbub) dan Peraturan Daerah (Perda) yang fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu membidik pada problem dasar kemiskinan ekstrem yakni kualitas SDM yg harus diatasi menggunakan program peningkatan gizi, ketahanan pangan, pendidikan, keterampilan, dan akses pada pekerjaan produktif di tingkat daerah. Pemda juga perlu menyediakan mata anggaran yang akuntabel, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan digunakan sesuai dengan rencana program. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran ini sangat penting agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat diukur keberhasilannya dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

**Pentingnya *Political Will* dari Seluruh *Stakeholder*:** *Political will* atau kemauan politik dari seluruh pemangku kepentingan di Belu sangat krusial untuk kesuksesan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini melibatkan tidak hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, tetapi juga LSM, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Seluruh pihak perlu bersatu dalam mencapai tujuan bersama, mengakui bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen jangka panjang.

**Peningkatan Kolaborasi antar *Stakeholder*:** Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta harus terus diperkuat. Melalui pendekatan *collaborative governance*, semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan sumber daya mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian program dengan kebutuhan spesifik lokal, memastikan program yang lebih *bottom-up* dan tepat sasaran. Dalam hal ini, koordinasi melalui kelompok kerja (Pokja) dan kampanye kesadaran di tingkat kabupaten dan kecamatan dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat pelaksanaan program.

**Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.** Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan relatif tingginya harapan lama sekolah memberikan indikasi adanya gap yang cukup tinggi diantara keduanya. Pemerintah Kabupaten Belu, melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga, perlu berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Belu setidaknya sampai 9 tahun. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat adat dan tokoh agama agar perhatian masyarakat dalam mencapai target rata-rata sekolah hingga 9 tahun dapat tercapai. Pada taraf selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Belu urgen melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, pengelolaan dana pendidikan, dan peningkatan infrastruktur dan kualitas guru pada jenjang SMA/K. Koordinasi ini sangat penting sebab menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/K) telah berpindah, dari yang tadinya dikelola oleh pemerintah kabupaten menjadi dikelola pemerintah provinsi. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu harus fokus membenahi pendidikan dasar dan menengah pertama melalui peningkatan tata kelola kelembagaan, pengelolaan dana pendidikan, dan peningkatan infrastruktur dan kualitas guru pada jenjang SD dan SMP.

**Pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belu, institusi pendidikan (SMA/K dan universitas), industri lokal, dan BLK dalam upaya meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.** Lulusan SMA/K atau perguruan tinggi di Kabupaten Belu perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di level lokal. Selain itu, terdapat urgensi untuk meningkatkan pelatihan bagi kelompok marjinal dan penduduk putus sekolah agar dapat berdaya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belu, industri lokal, dan BLK untuk membentuk SDM di Kabupaten Belu (baik lulusan SMA/K dan perguruan tinggi dan kelompok marjinal) yang dapat berkontribusi secara langsung terhadap sektor-sektor ekonomi potensial di Kabupaten Belu. Beberapa bentuk kerja sama yang bisa dilakukan diantaranya adalah (a) pemetaan dan analisis kebutuhan keterampilan di sektor-sektor ekonomi potensial, (b) pembuatan badan kerja sama yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi tripartit antara institusi pendidikan, pemerintah, dan swasta untuk menentukan sistem pembelajaran vokasional, (c) kerja sama pelatihan kerja non-formal kepada kelompok marjinal dan warga putus sekolah bersama BLK di Kabupaten Belu. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belu, institusi pendidikan (SMA/K dan universitas), industri lokal, dan BLK ini diharapkan mampu menjawab tantangan penyiapan tenaga kerja (*aspek supply*) dan pemenuhan tenaga kerja (*aspek demand*). Keseimbangan antara suplai tenaga kerja dan permintaan pekerja oleh industri lokal itu perlu diseimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan antara pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

**Peningkatan kesadaran menabung dan berinvestasi.** Tingginya sumbangan pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Belu ditopang oleh kegiatan konsumsi. Kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak hanya dipenuhi oleh produksi lokal dan domestik namun juga dari daerah lain. Hal ini ditunjukkan net ekspor yang negatif dan memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, komposisi pengeluaran untuk makanan lebih tinggi daripada pengeluaran non makanan. Tingginya konsumsi rumah tangga ini menyebabkan rendahnya tabungan dan tingginya kredit konsumsi di Kabupaten Belu. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar masyarakat memperhatikan konsumsinya serta mulai mempertimbangkan pentingnya melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga diantaranya mulai menabung dan investasi pada sektor-sektor riil.

#### **E. Rekomendasi**

Rencana tindak lanjut ini menjawab tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem Belu pada sejumlah lintas faktor, yaitu lingkungan, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan budaya. Program aksi jangka pendek dan menengah dapat menjadi pilihan strategis mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrem dari keterbatasan-keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program-program yang disusun mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk mandiri, tidak bergantung dengan bantuan, serta mampu mengembangkan potensi-potensi yang semaksimal mungkin di desa. Namun, bagaimana pun perlu ada program khusus yang bersifat *charity* bagi warga miskin ekstrem dengan kriteria khusus, seperti warga dengan keterbatasan/ kerentanan fisik, seperti difabel dan manula atas (usia di atas 65 tahun) dari keluarga miskin. Oleh karena itu, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem Belu perlu adanya kerja sama kolaboratif secara lintas sektoral, yaitu pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, LSM, komunitas adat, keuskupan gereja, CU, dan sektoral lainnya yang relevan. Spirit kolaborasi lintas sektor tersebut untuk menciptakan kemandirian, keulatan, serta pemerintah yang semakin responsif terhadap berbagai masalah pada program di berbagai sektor untuk menekan angka kemiskina ekstrem Belu.

Program ini akan memprioritaskan peningkatan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan pendidikan informal serta penguatan kearifan lokal seperti *turmutu* (duduk bersama). Fokus utama adalah untuk membangun kapasitas masyarakat secara komprehensif agar lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Namun, pendekatan ini tidak akan meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan ibu kepala rumah tangga yang membutuhkan perhatian khusus agar tidak semakin tertinggal dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan yang holistik ini, RTL diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup warga miskin ekstrem. Program ini juga

akan dikawal melalui monitoring dan evaluasi berkala agar tetap berada pada jalur yang benar dan dapat disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen dari semua pihak, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu.

### **Matriks Usulan Rencana Tindak Lanjut Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu**

No	Program	Leading sector
<b>Program Akurasi Data dan Implementasi Bantuan untuk Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem (<i>Quick win</i>)</b>		
1	Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional - Daerah	Dinas Sosial PMD – Desa
2	SOTK (Sistem Organisasi dan Tata Kelola) Pengelolaan Bantuan Sosial Serta Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang Efektif dan Efisien	Bagian Organisasi Setda
3	<i>Feasibility Studies</i> Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Belu	BP4D Belu
4	Riset Pendalaman tentang Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem dan Penumbuhan Inisiatif Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Lingkungan dan Dampak Krisis Iklim</li> <li>2. Faktor Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Primer (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan)</li> <li>3. Faktor Sosial – Budaya yang Membelenggu Masyarakat dalam Kemiskinan Ekstrem</li> </ol>	BP4D Belu
5	Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Belu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika Peningkatan Kualitas Kawasan Penduduk Warga Baru</li> <li>2. Perencanaan Kawasan Agroindustri dan Hilirisasi Produk Unggulan</li> </ol>	BP4D Belu
<b>Program Jangka Pendek-Menengah</b>		
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan serta Infrastruktur Dasar</b>		
6	Pemerataan Infrastruktur Pendukung Sosial - Ekonomi dan Kesejahteraan Warga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan dan Jembatan</li> <li>• MCK</li> <li>• Listrik</li> <li>• Jaringan internet</li> <li>• Penerangan jalan</li> <li>• Pasar</li> <li>• Terminal dan Angkutan Umum</li> </ul>	PUPR
8	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Bedah Rumah bagi Warga Miskin Ekstrem	PUPR
9	Pengolahan Lahan Kritis untuk Peningkatan Akses Penghidupan bagi Keluarga Miskin Ekstrem	ATR/BPN Belu
<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM</b>		
10	Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar melalui Sekolah Jarak Jauh di Wilayah Terisolir atau Terpencil	Dinas Pendidikan dan Olahraga – Pemerintah Desa
11	Peningkatan Kualitas Gizi Untuk Bayi, Balita, Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui	Dinas Kesehatan
12	Penurunan Angka Stunting, Kesehatan Ibu Dan Anak, Serta Balita	Dinas Kesehatan

	<p>Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Angkatan Kerja Melalui Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belu, Institusi Pendidikan (SMA/K dan universitas), Industri Lokal, dan BLK.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan dan Analisis Kebutuhan keterampilan di Sektor-Sektor Ekonomi Potensial di Kabupaten Belu;</li> <li>Pembuatan Badan Khusus Yang Berfungsi Sebagai Wadah Kolaborasi Tripartit Antara Institusi Pendidikan, Pemerintah, dan Swasta Untuk Menentukan Sistem Pembelajaran Vokasional;</li> <li>Kerja Sama Pelatihan Kerja Non-Formal Kepada Kelompok Marjinal Dan Warga Putus Sekolah Bersama BLK di Kabupaten Belu;</li> <li>Pembuatan dan Integrasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (<i>Labour Market Information System</i>, atau LMIS) Oleh Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Bekerja Sama Dengan Industri Lokal;</li> <li>Kebijakan atau Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Angkatan Kerja (mengatur kewajiban industri lokal untuk terlibat dalam upaya pelatihan tenaga kerja (khususnya industri menengah dan besar dengan profit lebih dari 200 juta per tahun), keharusan penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri (dikecualikan pada bidang atau posisi pekerjaan yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal), kewajiban tenaga luar daerah untuk melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, kewajiban BLK untuk terlibat dalam pelatihan kepada kelompok marjinal dan penduduk putus sekolah (d disesuaikan dengan hasil pemetaan dan analisis kebutuhan keterampilan yang telah dilakukan sebelumnya).</li> </ol>	<p>Institusi Pendidikan di Kabupaten Belu (SMA/K dan Universitas), Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu.</p>
<b>Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Warga</b>		
14	<p>Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah Kabupaten Belu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan ikon-ikon baru kemandirian ekonomi di Belu</li> <li>“Beli Belu : Program Apresiasi Produk lokal Kabupaten Belu”</li> </ol>	<p>Pemda Belu dan stakeholder ekonomi lain</p>
15	<p>Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Peluang Usaha, <i>Branding</i> dan Jejaring Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten Belu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertanian</li> <li>Perkebunan</li> <li>Peternakan</li> <li>Kain Tenun</li> </ol>	<p>Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu</p>
16	<p>Inovasi P4S Petani Muda Keren dan Ekskalasi Kelompok Inovatif Sektor Primer di Kabupaten Belu</p>	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Multi-Stakeholder lain</p>
17	<p>Peningkatan Kapasitas UMKM di Kabupaten Belu. Dengan sub-program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Pemasaran Digital Bagi UMKM di Kabupaten Belu;</li> <li>Sosialisasi Syarat dan Tahapan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Sertifikat Halal Bagi UMKM Berbasis Produksi Pangan;</li> <li>Pendampingan Pembuatan SPP-IRT dan Sertifikat Halal Bagi UMKM Berbasis Produksi Pangan.</li> </ol>	<p>Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu – Diskominfo</p>
18	<p>Optimalisasi BUMDes untuk Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian dan Kerajinan. Dengan detail sub-program sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan dan Analisis Rantai Pasok Nilai (<i>Value Chain Analysis</i>) Industri Pertanian dan Kerajinan di Kabupaten Belu;</li> </ol>	<p>Dinsos PMD – Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu</p>

	<p>b. Analisis, Pemetaan, dan Identifikasi Aktor-Aktor Rantai Pasok Nilai Industri Pertanian dan Kerajinan di Kabupaten Belu Dari Hulu (Suplai Bahan Baku) ke Hilir (<i>Off-taker</i> atau pembeli hasil produk pertanian dan kerajinan);</p> <p>c. Kolaborasi Bersama Penyuplai Bahan Baku dan Pembeli Hasil Produk Pertanian dan Kerajinan;</p> <p>d. Program Pelatihan Diversifikasi Produk Pertanian Bagi BUMDes di Kabupaten Belu;</p> <p>e. Program Pelatihan Pemasaran Produk Kerajinan Bagi BUMDes di Kabupaten Belu;</p>	
19	<p>Kolaborasi antara Kelompok Tani/Ternak/Kerajinan dengan Komunitas Basis CU untuk Kemandirian Perekonomian Masyarakat</p> <p>a. Pelatihan</p> <p>b. Pendampingan</p> <p>c. Permodalan</p> <p>d. Pengembangan usaha</p> <p>e. Pemasaran</p> <p>f. Pameran / Eksebis</p>	PD – CU KS – Keuskupan Belu
20	Pameran & Eksebis Produk Unggulan Kabupaten Belu	Multi-Stakeholder
21	Meningkatkan Edukasi Bagi Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Menabung	Pemda dan Perbankan
22	Meningkatkan Kesadaran Untuk Melakukan Investasi Di Sektor Riil Dimulai Dari Skala Kecil Dan Menengah	Pemda dan Perbankan
<b>Program Pengembangan Modal Sosial</b>		
23	Program Bantuan Sosial (Karitatif) untuk Kelompok Anak Terlantar, Difabel, Manula atau Kelompok dengan Keterbatasan Lainnya	Dinas Sosial PMD
24	Penguatan Kaderisasi Perlindungan Perempuan	DP3AP2
25	Program Ruang Aman Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	DP3AP2 - Pemerintah Desa – YPPA
<b>Program Pengembangan Modal Budaya</b>		
26	Program Penguatan Kelembagaan Adat dalam merespons Budaya Boros	Dinas Pendidikan dan Olahraga - Pemerintah Desa – Komunitas Adat
27	Program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	Dinas Sosial PMD – DP3AP2 – Dinas Pendidikan dan Olahraga – YPPA – Pemerintah Desa – Komunitas Adat
<b>Peningkatan Responsivitas Pemda, Desa dan Stakeholder dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem secara Kolaboratif</b>		
28	<p>Dukungan Kemitraan Stakeholder pada pelaksanaan Perda, Perbub, Perdes dan Perkades Terkait Penurunan Kemiskinan Ekstrem di tingkat Kabupaten maupun Desa/Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan terkait Budaya Hidup Boros</li> <li>• Peraturan sanksi sosial – budaya yang menyimpang</li> <li>• Peraturan lain yang terkait</li> </ul>	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
29	<p>Promosi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Penguatan Peran Kepemimpinan Desa, Gereja, LSM, dan Komunitas Adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Bersama Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem</li> <li>• Forum Bersama untuk Kemandirian Perekonomian Daerah melalui program “Beli Belu”</li> <li>• Forum Bersama Pengurangan dampak Kekeringan dan Krisis Iklim</li> <li>• Forum Bersama Mitigasi dan Responsivitas Terhadap Isu-isu Kemiskinan Kekinian (Jeratan pinjol, kelaparan ekstrem, dll)</li> <li>• Forum Lain yang Relevan</li> </ul>	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu